LAMPIRAN 1

**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN RESTITUSI
NOMOR : 1 TAHUN 2010
TANGGAL : 13 JANUARI 2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban pemulihan atau reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu:
 - a. Restitusi
 - b. Kompensasi
 - c. Rehabilitasi
 - d. Kepuasan (*Satisfaction*)
 - e. Jaminan ketidakberulangan (*non recurrence*)
2. Di Indonesia, hak restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana diatur secara khusus melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni mencakup bentuk ganti kerugian khusus yang diberikan kepada korban tindak pidana yang mengalami penderitaan (mencakup fisik dan psikis) atau kerugian hak milik dimana proses pemberiannya difasilitasi oleh LPSK, di mulai dari proses permohonan oleh korban, penelaahan oleh LPSK, dan akan diajukan ke Pengadilan agar dapat di tetapkan oleh Pengadilan. Restitusi ini secara khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban tindak pidana dan secara umum untuk mendukung/membantu proses reformasi sistem hukum pidana.
3. Undang-undang No 13 Tahun 2006 (untuk selanjutnya disebut dengan UU 13/2006) secara eksplisit menyatakan bahwa restitusi kepada korban merupakan bagian yang *inheren* dari Tugas Pokok dan Fungsi LPSK. Lebih lanjut, restitusi yang dimaksudkan oleh undang-undang, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU 13/2006, dinyatakan bahwa korban berhak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (untuk selanjutnya disebut dengan PP 44/2008). Dalam pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

4. Dalam hal tata cara pemberian restitusi, PP 44/2008 telah mengaturnya mulai dari Pasal 20 hingga Pasal 33. Berdasarkan ketentuan tersebut, tahap-tahap restitusi adalah sebagai berikut:
 - a. *Tahap pertama*, pengajuan permohonan restitusi. Pasal 20 s/d 22 menyebutkan bahwa restitusi diberikan kepada korban setelah ada permintaan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya. Permintaan tertulis tersebut diajukan dengan persyaratan tertentu kepada LPSK yang berkedudukan di ibukota atau lokasi terdekat dari pemohon dimana LPSK mendirikan kantor perwakilannya di daerah.
 - b. *Tahap kedua*, pemeriksaan kelayakan restitusi. LPSK selanjutnya akan memeriksa kelengkapan formal dan secara substantif akan menentukan layak tidaknya korban untuk diberikan restitusi. Setelah memutuskan layak atau tidaknya dan restitusi, selanjutnya LPSK akan menentukan besaran biaya ganti rugi yang akan di mintakan melalui pengadilan.
 - c. *Tahap ketiga*, pelaksanaan restitusi. Jika telah ada keputusan dari pengadilan tentang permohonan restitusi maka fungsi restitusi LPSK dalam melaksanakan restitusi akan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya (instansi yang berwenang), yaitu lembaga penegak hukum yakni kejaksaan dan pengadilan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

5. Maksud dari penyusunan pedoman dan standar prosedur operasional permohonan dan pelaksanaan restitusi adalah untuk memenuhi kebutuhan adanya panduan teknis operasional bagi LPSK termasuk panduan bagi masyarakat umum dan bagi pelaksanaan restitusi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari PP 44/2008.
6. Tujuan dari penyusunan pedoman dan standar prosedur operasional permohonan dan pelaksanaan restitusi adalah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan LPSK untuk pelaksanaan dan memfasilitasi korban tindak pidana dalam pelaksanaan restitusi agar dapat dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mudah dan sederhana, serta memberikan kepastian hukum.

C. PRINSIP-PRINSIP

7. Pelaksanaan restitusi didasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; yakni perlakuan penghormatan martabat dan harkat manusia dalam pelaksanaan restitusi sesuai dengan hak asasi manusia yang mencakup perlindungan, pelayanan, pemenuhannya.
 - b. Non diskriminasi; yakni tidak adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dalam pelaksanaan restitusi.
 - c. Keadilan; yakni adanya pemenuhan rasa keadilan bagi korban tindak pidana sesuai dengan hak dan kedudukannya sesuai dengan undang-undang dan prinsip umum lainnya dalam pelaksanaan restitusi.
 - d. Kepastian hukum: yakni adanya jaminan secara hukum baik substansi maupun prosedur dalam pelaksanaan restitusi terkait dengan hak dan kedudukan korban.

D. DASAR HUKUM

8. Dasar Hukum Penyusunan Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kompensasi, dan Restitusi kepada Saksi dan Korban. Namun sebagai dasar hukum tambahan, Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini juga mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya yakni UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat dan UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

E. RUANG LINGKUP

9. Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini adalah standar tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, dan oleh siapa dalam pelaksanaan layanan restitusi LPSK. Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini disusun untuk memberikan kepastian atas tata cara dan pranata layanan pemberian restitusi oleh LPSK guna menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.
10. Ruang lingkup pedoman dan standar prosedur operasional ini mencakup tiga tahap, yakni tahapan pengajuan permohonan restitusi, tahap pemeriksaan kelayakan restitusi, dan tahap pelaksanaan restitusi.
11. Pedoman dan standar prosedur operasional ini juga dilengkapi dengan panduan internal mengenai komponen restitusi sebagai panduan LPSK untuk menentukan bentuk restitusi yang dapat dimohonkan oleh korban tindak pidana ke Pengadilan.

F. PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

12. Dalam standar prosedur operasional ini, perlu adanya penjelasan beberapa pengertian sebagai berikut:
 - a. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban mencakup juga perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, yang diakibatkan oleh karena suatu tindak pidana.
 - b. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
 - c. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan kelayakan yang dilakukan oleh LPSK untuk memastikan terjadinya peristiwa, kebenaran identitas korban dan menentukan layak atau tidaknya restitusi diberikan (termasuk penjelasan tentang besaran ganti rugi yang dibutuhkan). Pemeriksaan substantif dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas tindak pidana dan kerugian yang nyata-nyata diderita Korban.
 - d. Pengadilan adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan.
 - e. UP2 LPSK adalah Unit Penerimaan Permohonan LPSK

BAB II

PROSEDUR PERMOHONAN RESTITUSI

A. PERMOHONAN RESTITUSI

A.1. Syarat-syarat Formal Permohonan

13. Permohonan Restitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP 44/2008, pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan oleh korban, keluarga dan atau kuasa hukumnya.
 - b. Jika permohonan diajukan selain oleh korban secara langsung, maka jika menggunakan kuasa dilampirkan surat kuasa khusus dan jika permohonan disampaikan oleh keluarganya maka dilampirkan surat keterangan hubungan keluarga.
 - c. Permohonan tersebut dibuat secara tertulis, di atas kertas yang bermaterai cukup, untuk diajukan kepada Pengadilan melalui perantaraan LPSK.
 - d. Korban, keluarga atau kuasanya hanya menyampaikan permohonannya ke LPSK, selanjutnya LPSK yang memiliki wewenang untuk mengajukannya ke Pengadilan.
 - e. Pengajuan permohonan Restitusi, dapat dilakukan ketika (1) belum diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (2) saat diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau (3) sebelum penuntut umum membacakan tuntutan di depan persidangan.
 - f. Jangka waktu pengajuan permohonan Restitusi yang dilakukan ketika diterima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat di terima oleh LPSK paling lambat setelah 90 hari setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di ketahui oleh pemohon (korban).
 - g. LPSK tidak dapat menerima permohonan restitusi dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bila putusan tersebut terjadi pada saat belum lahirnya UU 13/2006.
14. Permohonan minimal berisi:
- a. **Identitas Pemohon**, yang menjelaskan nama lengkap pemohon, tempat tanggal lahir, alamat domisili, nomor telepon yang dapat dihubungi, agama, pekerjaan, status perkawinan, jumlah tanggungan dalam keluarga, nama dan hubungan keluarga bertanggung dengan pemohon, serta status/kapasitas pemohon sehingga menjadi korban dari tindak pidana.
 - b. **Uraian tindak pidana**, menjelaskan tentang peristiwa tindak pidana yang dialami oleh korban. Peristiwa tersebut mencakup waktu, tempat, kronologis peristiwa yang terjadi, kondisi korban pada saat peristiwa terjadi, posisi korban ketika peristiwa terjadi, dan keterangan-keterangan lain yang menjelaskan jalannya peristiwa tindak pidana tersebut.
 - c. **Identitas pelaku tindak pidana**, menerangkan identitas pelaku atau pihak-pihak yang melakukan tindak pidana. Dituliskan nama pelaku, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan dari pelaku, dalam rangka apa pelaku melakukan tindak pidana, dan penjelasan lainnya, yang mengungkap identitas pelaku tindak pidana.¹
 - d. **Uraian kerugian yang nyata diderita oleh korban dan/atau keluarganya**, menguraikan

¹ Syarat ini dapat di lengkapi oleh LPSK

bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh pemohon, akibat tindak pidana. Kerugian tersebut harus nyata-nyata diderita oleh pemohon. Dan, termasuk ke dalam jenis kerugian yang dapat dicover melalui mekanisme restitusi, yang meliputi: biaya pengobatan dan biaya konseling, kehilangan pendapatan atau keuntungan yang dapat diperhitungkan, biaya pemakaman dan penguburan, biaya transportasi selama mengurus proses pengajuan restitusi, hilangnya kebahagiaan dalam hidup, akibat penderitaan yang dialami, biaya penggantian atau perbaikan asset dan property, dan biaya-biaya tambahan lainnya yang dapat dibuktikan penggunaannya.

- e. **Bentuk Restitusi yang diminta**, dalam penjelasan ini diuraikan bentuk-bentuk restitusi yang diminta oleh pemohon baik berupa uang atau berujud barang dari pelaku.
15. LPSK menyediakan formulir permohonan restitusi yang berisikan data-data di atas untuk pemohon yang tidak bisa membuat permohonan pengajuan. Pemohon restitusi dapat mengisi formulir yang disediakan LPSK, membubuhinya dengan materai yang cukup, dan menandatangani. Untuk kemudian menyerahkan kembali ke LPSK guna dilakukan pemeriksaan dan diajukan ke penuntut umum atau ke Pengadilan.
 16. Selain berisikan informasi di atas, permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya, juga harus dilampiri dengan sejumlah bukti-bukti. Baik bukti yang menjelaskan tentang identitas korban, maupun bukti-bukti terkait dengan jenis-jenis kerugian yang diderita korban, sehingga perlu diajukan permohonan restitusi. Bukti-bukti tersebut meliputi:
 - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, atau kartu identitas lainnya.
 - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang didalamnya termasuk Slip gaji dari bendaharawan gaji tempat korban bekerja atau Surat Pajak Terutang (SPT) yang menjelaskan Pajak Penghasilan sehingga diketahui penghasilan korban dan juga SPT PBB dari properti korban yang musnah. Nilai taksiran barang/benda milik korban yang hilang, yang dikeluarkan oleh juru taksir terakreditasi. Bukti renovasi rumah atau tempat kerja, untuk memudahkan aktivitas korban, yang dikeluarkan pelaksana renovasi. Pemohon juga perlu melampirkan bukti-bukti lainnya sesuai dengan bentuk restitusi yang diajukan korban.
 - c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan, yang menyantumkan nota-nota dan faktur pembayaran, yang terkait dengan biaya pengobatan korban. Laporan pengobatan (*medical report*), yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang merawat korban, termasuk juga Laporan konseling untuk kesehatan (*mental health counseling*). Termasuk jika ada adalah bukti-bukti pengeluaran untuk membeli peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan korban, seperti kursi roda, dan lain-lain.
 - d. fotokopi surat kematian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal Korban meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa, tempat korban berdomisili.
 - e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana, Di dalamnya menguraikan secara singkat mengenai peristiwa tindak pidana yang dialami korban.
 - f. fotokopi putusan pengadilan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal apabila permohonan diajukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 - g. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
 - h. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
 17. Kelengkapan dokumen permohonan, dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan, bahwa kerugian nyata-nyata dialami oleh korban, akan sangat menentukan diteruskan atau tidak diteruskannya permohonan restitusi dari LPSK ke penuntut umum atau kepada Pengadilan.
 18. Fotokopi harus disahkan oleh pejabat yang berwenang, sementara kuitansi dan surat-surat resmi harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.